

Available online at <http://jurnal.abulyatama.ac.id/dedikasi>
ISSN 2548-8848 (Online)

Universitas Abulyatama
Jurnal Dedikasi Pendidikan



Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Sakdiah¹, Zamzami¹

¹ Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

* Email korespondensi : sakdiah_abulyatama@yahoo.com¹, zamzamirahman@gmail.com²

Diterima Agustus 2017; Disetujui Desember 2017; Dipublikasi 31 Januari 2018

Abstract: *The problems of school-based management in terms of improving the quality of education that has not been solved at this time is one of them related to the empowerment of the school committee. Ideally the school committee should be a parallel partner for the principal and teachers in adopting policies for improving the quality of education. The purpose of this study was to determine the empowerment of school committees in improving the quality of education at Syiah Kuala State Elementary School in Banda Aceh. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. Technique research data of this research is interview, observation, and documentation. The subjects of this research are principals, school committees, and teachers of Syiah Kuala State elementary school in Banda Aceh. The conclusion of the research shows that the effort done by the school in empowering the school committee is to make regular meetings every three months, and to make a meeting at the end of each semester. It was at this meeting that the principal and the school committee discussed important matters concerning improving the quality of education quality improvement and other matters deemed necessary. The involvement of school committees in formulating work programs generally can be said to run well. In every work program preparation, the school always involves school committees and teachers so that each work program is really known by the school committee. The authority of the school committee is not the same as the principal, including in managing school finances. School committees have limited authority to provide certain inputs or considerations regarding school programs. Thus, the authority of the school committee is not yet optimal, especially in financial management..*

Keywords : *Empowerment, school committees, and education quality*

Abstrak: Permasalahan manajemen berbasis sekolah dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan yang belum terpecahkan saat ini salah satunya berkaitan dengan pemberdayaan komite sekolah. Idealnya komite sekolah menjadi mitra sejajar bagi kepala sekolah dan guru dalam mengambil kebijakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penelitian data penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan guru-guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan sekolah dalam memberdayakan komite sekolah adalah dengan membuat rapat rutin setiap tiga bulan, dan membuat rapat pada setiap akhir semester. Pada rapat kerja itulah kepala sekolah dan komite sekolah membahas hal-hal penting menyangkut peningkatan mutu pendidikan dan hal-hal lain yang dipandang perlu. Keterlibatan komite sekolah dalam menyusun program kerja umumnya dapat

Pemberdayaan Komite Sekolah....

(Sakdiah & Zamzami, 2018)

dikatakan berjalan dengan baik. Dalam setiap penyusunan program kerja, pihak sekolah senantiasa melibatkan komite sekolah dan guru-guru sehingga setiap program kerja itu benar-benar diketahui oleh komite sekolah. Wewenang komite sekolah tidak sama dengan kepala sekolah, termasuk dalam mengelola keuangan sekolah. Komite sekolah wewenangnya hanya sebatas memberikan masukan-masukan atau pertimbangan tertentu berkenaan dengan program sekolah. Dengan demikian, wewenang komite sekolah memang belum optimal, terutama dalam pengelolaan keuangan..

Kata kunci : pemberdayaan, komite sekolah, dan mutu pendidikan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di semua aspek kehidupan manusia sehingga berbagai permasalahan dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat sehingga bangsa Indonesia perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan sehingga bangsa Indonesia tidak kalah bersaing dalam era globalisasi.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui pembangunan sarana lembaga pendidikan yang baik, pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan media pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi

ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Pasal 1 ayat 6) menegaskan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurang berhasil ini ditunjukkan antara lain dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) siswa yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti, bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif kecil.

Ada dua faktor yang dapat dijelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan yang selama ini lebih bersifat input-oriented. Strategi ini lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan menghasilkan

output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata, strategi input-output tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan, tetapi hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat sekolah. Dengan kata lain, kompleksitasnya cakupan masalah pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar, aspirasi masyarakat dalam pendidikan, sering tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Dengan demikian, kajian tentang efektivitas pendidikan harus dilihat secara sistematis, mulai dari masalah input, proses, output, dan outcome dengan indikator yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif (Mulyasa, 2002).

Ada dua tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yaitu sebagai pendidik dan administrator. Sebagai pendidik, kepala sekolah dasar berperan juga sebagai guru. Sebagai seorang administrator, kepala sekolah harus mengelola: “Program sekolah, murid, personil, kantor sekolah, keuangan sekolah, pelayanan bantuan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.” (Sutisna, 1998).

Kepala sekolah yang baik merupakan salah satu kunci untuk dapat menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa membina dan

meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien (Mulyasa, 2004). Kondisi sekolah yang baik harus didukung oleh sumber daya atau komponen-komponen yang baik pula, baik komponen guru, murid, maupun sarana dan prasarana.

Pelaksanaan pengelolaan pendidikan (khususnya sekolah) sangat rumit dan unik, terutama karena terbatasnya sumber-sumber pendukung yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang ideal. Hal ini memaksa para kepala sekolah selaku manajer pendidikan di sekolah dituntut untuk berusaha keras mencari, mempelajari, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip, metode, dan teknik perencanaan dengan melibatkan komite sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Namun kenyataannya, pada sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar di Kecamatan Syiah Kuala, komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah belum diberdayakan sebagaimana yang diharapkan.

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat disebutkan bahwa pembentukan komite sekolah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka peningkatan mutu lembaga pendidikan. Komite sekolah merupakan suatu lembaga yang perlu dibentuk dalam rangka pelaksanaan MBS. Pada hakikatnya komite sekolah ini dibentuk untuk membantu menyukseskan kelancaran program sekolah. Dengan demikian, pembentukan komite sekolah, terutama dalam kaitannya dengan masalah relevansi pendidikan yang akan diwujudkan melalui MBS agar apa yang akan dilaksanakan di sekolah senantiasa sejalan dengan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bila dikaitkan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), eksistensi komite sekolah dapat mendukung terwujudnya transparansi penggunaan biaya pendidikan pada suatu sekolah. Biaya pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia jangka panjang, di mana biaya pendidikan yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat, tetapi tetap berpengaruh positif di masa depan. Atas dasar itulah, dana atau kebijakan lainnya yang mengarah kepada peningkatan mutu, idealnya melibatkan komite sekolah.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pemberdayaan dan Komite Sekolah

Secara etimologi, kata pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, lalu dilekati awalan pe- dan akhiran -kan, yang berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan sesuatu (Depdiknas, 2005). Dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pemberdayaan berarti peningkatan efisiensi, mengurangi kemampuan pemerintah dalam mendanai pendidikan serta mengefektifkan peran serta masyarakat dalam proses pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

MBS merupakan suatu bentuk pengelolaan sekolah yang memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pengelolaan sekolah. Fattah (2004) mengatakan bahwa MBS adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan memberikan kekuasaan dan meningkatkan

partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. MBS memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan ke setiap berkepentingan di tingkat lokal.

Model MBS yang sedang diterapkan dalam kaitan dengan pemberdayaan komite sekolah merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan dalam rangka otonomi pengelolaan pendidikan. Konsep MBS mengedepankan kolaborasi antara sekolah, masyarakat (pengguna jasa pendidikan) dan pemerintah dikembangkan untuk memberikan kemandirian kepada sekolah (persatuan pendidikan dalam mengelola sumber daya sekolah yang ada guna mencapai pendidikan berdasarkan tolok ukur yang disepakati (Umaedi, 1999).

Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga nonpolitis dan nonprofit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat dan cendekia pemerhati pendidikan), wakil masyarakat berinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah) dan utusan pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan). Dasar diubahnya BP3 menjadi Komite Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

- tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah otonom.

Dalam hubungannya dengan MBS, keberadaan komite sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan MBS. Keberadaan komite sekolah merupakan suatu kepatutan yang mutlak perlu dalam MBS. Demikian juga unsur BP3 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan komite sekolah. Artinya, secara substantif peran BP3 melebur ke dalam komite sekolah karena dalam kadar tertentu peran BP3 diyakini masih relevan dan signifikan dalam menunjang garapan pendidikan, termasuk dalam implementasi model MBS (Umaedi, 1999).

Komite sekolah merupakan suatu forum resmi untuk mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan lembaga sekolah serta berfungsi sebagai wadah bagi para stakeholder dalam menjalankan tugasnya untuk membantu sekolah. Bantuan yang diberikan tersebut bersasaran untuk meningkatkan kinerja bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu (Umaedi, 1999).

Komite sekolah pada tingkat strategik berhubungan dengan hal-hal merumuskan kebijakan sekolah, memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan meminta

pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan proporsional dan terbuka. Pada tingkat operasional yaitu merencanakan program kerja dan mengevaluasi program kerja sekolah.

Kewenangan dan Tugas Pokok Komite Sekolah

Komite sekolah yang dibentuk sesuai dengan jenjang dan jenis sekolah, dalam posisinya sebagai mitra kerja sekolah mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
2. Bersama-sama sekolah menetapkan rencana strategik pengembangan sekolah.
3. Bersama-sama sekolah menetapkan standar pelayanan sekolah.
4. Bersama-sama sekolah membahas bentuk kesejahteraan personil sekolah.
5. Bersama sekolah menetapkan RAPBS.
6. Mengkaji pertanggungjawaban program sekolah dan implementasinya.
7. Mengkaji dan menilai kinerja sekolah.
8. Mendorong sekolah untuk melakukan internal Monitoring dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
9. Merekomendasikan guru dan kepala sekolah untuk dipromosikan.
10. Menerima kepala sekolah dan guru yang dipromosikan untuk bekerjasama.
11. Merekomendasikan bagi kepala sekolah atau guru yang melanggar etika kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/4/2002, komite sekolah

sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas pokok di antara sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat dewan sesuai dengan program yang ditetapkan;
2. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi;
3. Bersama-sama sekolah menyusun standar pelayanan pembelajaran di sekolah;
4. Bersama-sama sekolah membahas hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan standar kompetensi siswa.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/4/2002, peran komite sekolah di antaranya adalah sebagai (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perseorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Adapun fungsinya di antaranya adalah (1) pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) pendukung, baik yang berwujud final pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih sebab sesuai dengan masalah penelitiannya, yaitu menyangkut dengan perilaku manusia, yaitu pemberdayaan komite sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian dipilih secara acak berjumlah 5 unit Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Syiah Kuala, di antara 1) SD Negeri 57 Banda Aceh; 2) SD Negeri 83 Banda Aceh; 3) SD Negeri 82 Banda Aceh; 3) SD Negeri 69 Banda Aceh; dan 5) SD Negeri 106 Banda Aceh. Waktu pelaksanaan penelitian untuk pengumpulan data lapangan, dimulai sejak 25 Juni 2016 s.d. 25 Juli 2016. Tahap-tahap penelitian ini adalah tahapan orientasi, kegiatan eksploitasi, dan (3) tahap member check.

Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek yang berkaitan dengan cara pengumpulan data, yakni subjek ditentukan berdasarkan tingkat penguasaannya terhadap informasi yang akan diungkapkan informan yang mempunyai informasi lengkap dan cermat diutamakan menjadi subjek. Subjek penelitian ini adalah 5 orang kepala sekolah dan lima orang ketua komite pada SD Negeri tersebut.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pedoman observasi (check list) dan pedoman wawancara.

Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang ditampilkan benar-benar kredibel dan valid sehingga tidak diragukan lagi tingkat kebenarannya. Langkah ini ditempuh dengan cara mengumpulkan sejumlah data kualitatif (hasil wawancara) antara subjek yang satu dengan lainnya dibandingkan, lalu dianalisis serta disesuaikan dengan data dokumenter, dan akhirnya disimpulkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan kegiatan pembelajaran, pemberdayaan komite sekolah, rapat pengurus komite sekolah partisipasi komite sekolah, keaktifan komite sekolah, dan peran komite sekolah. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab atau konfirmasi kepada subjek penelitian. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen yang berhubungan dengan pemberdayaan komite sekolah yang dilakukan kepala sekolah dasar negeri di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu (1) reduksi data, (2) display, (3) mengambil kesimpulan dan verifikasi (Nasution, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha yang Dilakukan Kepala Sekolah dalam Memberdayakan Komite Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Kepala sekolah sebagai *top manager* harus benar-benar memahami dan mempunyai

kemampuan manajerial dalam mengelola sekolah. Menyangkut hubungan sekolah dan masyarakat, tentu saja kepala sekolah harus memberdayakan komite sekolah. Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam masyarakat dalam memberdayakan Komite Sekolah Dasar, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh adalah dengan membuat rapat rutin setiap tiga bulan dan membuat rapat pada setiap akhir semester. Pada rapat kerja itulah kepala sekolah dan komite sekolah membahas hal-hal penting menyangkut peningkatan mutu pendidikan dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Materi yang disampaikan dalam pertemuan dengan komite sekolah berkaitan dengan pengalihan bentuk tanggung jawab (akuntabilitas) BP3 menjadi komite sekolah dan dibahas masalah tugas serta fungsi komite sekolah dalam kaitannya dengan pelaksanaan MBS di lingkungan sekolah. Adapun bentuk implementasi komite sekolah tersebut tergantung pada tiap-tiap sekolah untuk memformulasikannya sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi, masalah, dan peluang yang dimiliki oleh sekolah itu.

Menyikapi bahwa masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dalam sosialisasi komite sekolah tersebut dibahas pula mengenai teknik-teknik analisis kebutuhan dan analisis potensi yang perlu dimiliki oleh setiap kepala sekolah. Dikatakan oleh kepala sekolah dasar bahwa pembentukan komite sekolah pada setiap sekolah harus berangkat dari analisis lingkungan pendidikan (sekolah), yang antara lain analisis lingkungan sekolah dan analisis potensi lingkungan pendidikan.

Aspek lain yang disampaikan Kepala Sekolah

Dasar Negeri 83 Banda Aceh, bahwa dalam menyosialisasikan komite sekolah dalam konsep MBS adalah memberikan pemahaman kepada tokoh masyarakat, orang tua murid, serta para komite sekolah tentang konsep akuntabilitas (baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat) dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pendidikan melalui peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan murid. Dikatakan oleh Kepala SD Negeri 57 bahwa dalam implementasi MBS, komite sekolah perlu mendapatkan laporan pertanggungjawaban hasil kinerja sekolah untuk diketahui oleh publik (terutama orang tua murid) di samping kepada pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.

Pemberdayaan komite sekolah dimaksud adalah untuk mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan program-program unggulan sekolah secara maksimal. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan dan pendidikan yang bersumber dari pemerintah. Kerja sama sekolah dan pihak *stakeholder* dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai program unggulan sekolah, baik melalui pelaksanaan kurikulum muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Keterlibatan *stakeholder* dalam penyelenggaraan pendidikan, umumnya dimanifestasikan dalam bentuk pemberian dana untuk penyelenggaraan program unggulan sekolah. Dalam posisi seperti ini dikatakan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 83 bahwa guna mendukung pelaksanaan komite sekolah, kepala sekolah perlu mendukung pelaksanaan MBS. Di samping itu, kepala sekolah

perlu memiliki keterampilan dalam melakukan interaksi dengan berbagai pihak.

Keterlibatan Komite Sekolah dalam Menyusun Program Kerja

Hasil pembinaan dan penyusunan program kerja kepala sekolah, belum semua sekolah dasar yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh siap melaksanakan MBS secara penuh. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi siap tidaknya untuk melaksanakan MBS tersebut. Penyusunan program kerja sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru pada sekolah dasar tersebut. Untuk melaksanakan proses tersebut, kepala sekolah tidak melibatkan komite sekolah karena menyangkut program intern sekolah. Menyangkut hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru-guru, dan komite sekolah.

Hasil wawancara dengan informan bahwa peluang yang dimiliki sekolah dasar dalam pembentukan komite sekolah sangat baik. Hal ini terbukti bahwa dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan guru-guru tidak mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan masyarakat (orang tua murid) sebab kepala sekolah cukup mengundang komite sekolah, kemudian duduk bersama memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan sekolah. Dengan sendirinya konsep MBS sudah terlaksana dalam pengelolaan sekolah dasar sesuai dengan program pemerintah.

Keterlibatan kalangan pengusaha di lingkungan pendidikan sangat diperlukan dalam melaksanakan MBS. Hasil pengamatan peneliti pada sejumlah sekolah di Kecamatan Syiah Kuala, kalangan pengusaha terlibat dalam komite sekolah.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 82 dan struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 69. Di sekolah ini ada beberapa pengusaha yang ikut memikirkan pendidikan di kecamatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam menyusun program kerja di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda pada umumnya dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Setiap penyusunan program kerja, pihak sekolah sudah melibatkan komite sekolah dan guru-guru sehingga setiap program kerja tersebut benar-benar diketahui oleh komite sekolah.

Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dilihat dari Segi Kewenangan MBS yang Diterapkan di Sekolah Dasar, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Komite sekolah pada level strategik berhubungan dengan hal-hal merumuskan kebijakan sekolah, menetapkan kebijakan sekolah, melaksanakan kebijakan sekolah, memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan proporsional dan terbuka. Pada level operasional adalah merencanakan program kerja dan mengevaluasi program kerja sekolah. Atas dasar itulah, pemberdayaan komite sekolah memegang peranan yang sangat penting dilihat dari segi kewenangan dan konteks MBS.

Berdasarkan wawancara dengan sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, dapat disebutkan bahwa perhatian komite sekolah terhadap usaha peningkatan mutu

pendidikan dewasa ini mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDN 106 bahwa kepala sekolah telah berupaya menyediakan kotak saran bagi orang tua murid pada setiap Minggunya. Hasil telaah tentang saran-saran dari orang tua murid, pada dasarnya menghendaki adanya penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu. Bentuk perhatian orang tua tersebut juga sering disampaikan secara langsung, baik kepada kepala sekolah maupun kepada guru-guru yang mengadakan konsultasi dan diskusi mengenai bentuk bantuan atau partisipasi orang tua murid dalam mendukung prestasi belajar anak.

Di samping pengadaan kotak saran, kegiatan rutin yang dilakukan oleh komite sekolah adalah melakukan pertemuan dengan para orang tua murid menjelang pembagian rapot. Dalam kegiatan tersebut, kepala sekolah menampung berbagai harapan dan pikiran inovatif orang tua murid tentang penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya di sekolah. Manfaat yang dirasakan dari kegiatan tersebut sangat membantu untuk merumuskan program kegiatan sekolah pada tahun berikutnya atau apabila dipandang penting dan mendesak serta memungkinkan untuk dilaksanakan. Masukan dari orang tua murid tersebut dapat dijadikan bahan dalam menyusun program pembelajaran untuk semester berikutnya.

Karakteristik lain yang dapat mendukung terwujudnya kreativitas komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri 106 adalah adanya usaha kepala sekolah untuk memperoleh dana dari NGO asing. Menurut kepala sekolah tersebut, bantuan dari NGO dapat digunakan untuk membangun kembali gedung sekolah mereka yang luluh lantak oleh

tsunami.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 57 dikemukakan bahwa budaya kerja dan mental kerja komite sekolah yang bersifat menunggu perintah atau ajakan dari pihak luar merupakan faktor penghambat lainnya dalam melaksanakan konsep MBS di sekolah yang dikelolanya. Prinsip utama MBS sebenarnya terletak pada kemandirian dan kreativitas para pengurus/anggota komite sekolah untuk mengambil berbagai kebijakan strategis dalam rangka peningkatan layanan proses pembelajaran di lingkungan sekolahnya.

Berdasarkan data telaah dokumentasi, disajikan penilaian kinerja komite sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 57 sudah berjalan dengan baik. Sekolah ini tidak terkena tsunami, tetapi dampaknya sangat besar. Hal ini juga menyebabkan sekolah ini mendapat perhatian dan bantuan dari NGO asing. Program komite sekolah berjalan sebagaimana mestinya.

Melalui hasil wawancara dengan kepala sekolah juga diketahui bahwa langkah-langkah penting yang dilakukan dalam memberdayakan komite sekolah adalah melalui sosialisasi. Langkah ini dilakukan oleh kepala sekolah dasar, guru, dan orang tua murid. Langkah ini diikuti oleh semua kepala sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kota Banda. Aspek lainnya yang disampaikan oleh informan yang diwawancarai bahwa menyosialisasikan komite sekolah dalam konteks MBS adalah memberikan pemahaman kepada sekolah tentang konsep akuntabilitas (baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat) dalam penyelenggaraan pendidikan dan mutu

pendidikan melalui peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan murid.

Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilihat dari segi kewenangan berdasarkan MBS yang diterapkan di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala. Wewenang komite sekolah tidak sama kepala sekolah, termasuk dalam mengelola keuangan sekolah. Komite sekolah wewenangnya hanya sebatas memberikan masukan-masukan atau pertimbangan tertentu berkenaan dengan program sekolah. Dengan demikian, wewenang komite sekolah memang belum optimal, khususnya pengelolaan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam masyarakat dalam memberdayakan Komite Sekolah Dasar, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh adalah dengan membuat rapat rutin setiap tiga bulan dan membuat rapat pada setiap akhir semester. Pada rapat kerja itulah kepala sekolah dan komite sekolah membahas hal-hal penting menyangkut peningkatan mutu pendidikan dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Keterlibatan komite sekolah dalam menyusun program kerja di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda pada umumnya dapat dikategorikan berjalan dengan baik. Setiap penyusunan program kerja, pihak sekolah sudah melibatkan komite sekolah dan guru-guru sehingga setiap program kerja tersebut benar-benar diketahui oleh komite sekolah.

Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilihat dari segi kewenangan

berdasarkan MBS yang diterapkan di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala. Wewenang komite sekolah tidak sama kepala sekolah, termasuk dalam mengelola keuangan sekolah. Komite sekolah wewenangnya hanya sebatas memberikan masukan-masukan atau pertimbangan tertentu berkenaan dengan program sekolah. Dengan demikian, wewenang komite sekolah memang belum optimal, khususnya pengelolaan keuangan..

Saran

Diharapkan Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh melakukan upaya pemberdayaan komite sekolah dengan lebih optimal. Di samping itu, komite sekolah yang benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik diupayakan pemberian penghargaan dari pihak sekolah terhadap kinerja mereka.

Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam komite sekolah di Kecamatan Syiah Kuala agar lebih meningkatkan perhatian dan kepeduliannya terhadap peningkatan mutu sekolah. Upaya ini dapat ditempuh dengan senantiasa memikirkan program atau kebijakan strategis untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Diharapkan kepada pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, memberikan perhatian yang besar terhadap pemberdayaan komite sekolah. Upaya ini dapat ditempuh dengan pengadaan penataran atau diskusi ilmiah untuk meningkatkan kinerja komite sekolah..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (1998). *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Anwar, M. I. (2003). *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan Teori, Konsep, dan Isu*. Bandung: Alfabeta.
- Brisson, J. M. (2000). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan pada dan Setelah Krisis*. Jakarta: LPIST dan Pustaka Pelajar.
- Daryanto, M. (2005). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdiknas. (2003) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djarmiko, Y. H. (2002). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fakry, E. (1992). *Konsep Mutu dalam Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: FIP-IKIP Bandung.
- Fatah, N. (1996). *Produktivitas Lembaga Pendidikan: Suatu Tinjauan Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: Depdikbud.
- Fatah, N. (1999). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatah, N. (2004). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Banyu Quraisy.
- Furqon. (2000). *Pengembangan Sekolah*

- Efektif*. Bandung: UPI.
- Gaffar, M. F. (2000). *Pembiayaan Pendidikan: Aspek Penting dalam Pengelolaan Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Handyaningrat, S. (2000). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayat, S. (2000). *Antisipasi Pengembangan Pendidikan dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: UPI.
- Idrus, J. (2005). *Suatu Pengantar Manajemen Sekolah*. Banda Aceh: Ar-Raniry.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa.
- Khairiah. (2006). *Kerja Sama Guru dan Komite Sekolah dalam Peningkatan Komite Sekolah*. Tesis tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Unsyiah.
- Mckenna, E. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan: Totok Budi Santoso. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, J. L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Pendidikan pada SMP di Kota Sigli*. Tesis tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Unsyiah.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1992). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, H. (2003) *Manajemen Strategik Organisasi Nonprofit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pidarta, M. (1995). *Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar, Seri Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Pidarta, M. (2000). *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Robbin, S. (2003). *Perilaku Organisasi*. Edisi Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosihan, B. (2003). *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books.
- Ruki, A. S. (2003). *Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sanusi, A. (1998). *Pendidikan Alternatif*. Bandung: Grafindo Media Utama.
- Satori, D. (1999). *Analisis Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Satori, D. (2000). *Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Bandung: UPI.
- Satori, D. (2001). *Konsep Dasar MBS dan Dewan Sekolah, Modul Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Soedijarto. (1999). *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sucipto, B. W., dkk. (2002). *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Books.

▪ *How to cite this paper :*

Sakdiah, S., & Zamzami, Z. (2018). Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 2(1), 29–41.